

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KARTU INDONESIA PINTAR
(KIP) DI SMP NEGERI 2 TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

Disusun

Oleh :

INTAN AYUNI PULUNGAN

NPM : 181801014

Program Studi Magister Administrasi Publik



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 2
Tanjung Pura Kabupaten Langkat

Nama : Intan Ayuni Pulungan

NPM : 181801014

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. Hamdani Harahap, M.Si

Pembimbing II



Dr. Abdul Kadir M.Si

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Abdul Kadir M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani

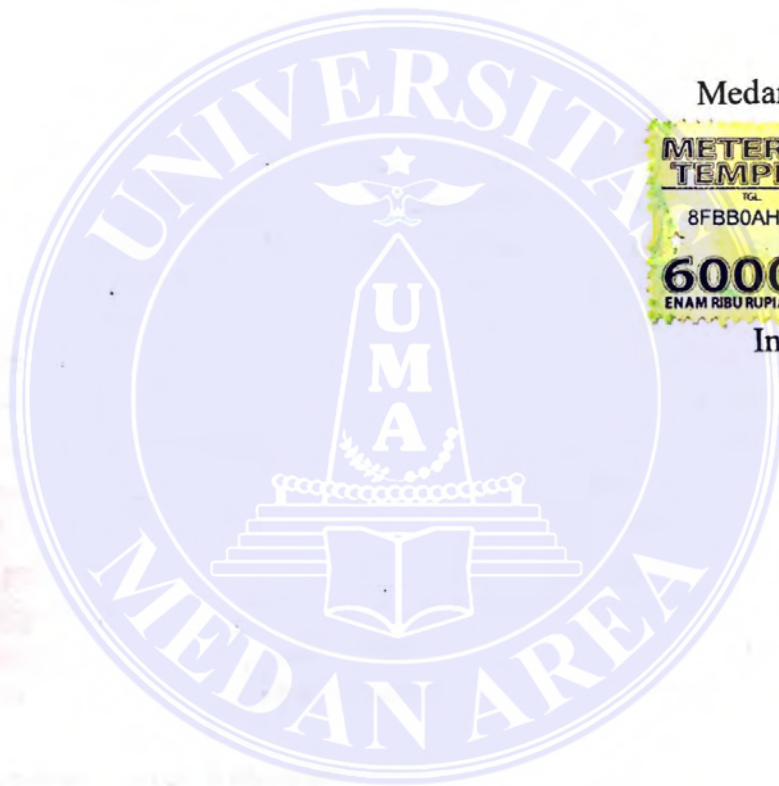
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang saya juga tidak terdapat karya atau suatu pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Medan, Agustus 2020



IntanAyuniPutungan



ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI SMP NEGERI 2 TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Nama : Intan Ayuni Pulungan
Npm : 181801014
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 2 Tanjung Pura Kabupaten Langkat serta kendala hambatan apa saja yang di hadapi untuk mengetahui program Kartu Indonesia Pintar di sekolah Smp Negeri 2 Tanjung Pura. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif dengan Analisis Kualitatif dan menggambarkan keadaan objek penelitian wawancara. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri 2 Tanjung Pura Serta Pemanfaatan Dana Program Kartu Indonesia Pintar dan Apa Saja Kendala dan Hambatan yang Terjadi di SMP Negeri 2 Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Program Kartu Indonesia Pintar belum berjalan baik dan strategis di SMP 2 Tanjung Pura karna banyaknya siswa miskin tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dan program KIP ini tidak tepat sasaran dan kurang meratanya pembagiannya, pemanfaatan dana yang sulitnya pengawasan yang dilakukan sebab mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa, dana tersebut yang mengelola adalah orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit untuk mengawasi dana tersebut.

Kata Kunci : Efektivitas, Kartu Indonesia Pintar

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE INDOONESIAN PINTAR CARD PROGRAM (KIP) IN SMP NEGERI 2 TANJUNG PURA, LANGKAT DISTRICT

Name : Intan Ayuni Pulungan
Npm : 181801014
Study Program : Master of Public Administration
Advisor I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Supervisor II : Dr. Abdul Kadir, M.Si

This study aims to see the effectiveness of the implementation of the Smart Indonesia KARTU (KIP) at SMP Negeri 2 Tanjung Pura, Langkat Regency and what limitations are faced to see the Indonesia Smart Card program at SMP Negeri 2 Tanjung Pura. is a descriptive method with qualitative analysis and describes the state of the interview research object. The problem in this study is to find out how the effectiveness of the implementation of the Indonesian card at SMP Negeri 2 Tanjung Pura and the utilization of funds for the Indonesia Smart Card program and what are the obstacles and obstacles that occur in SMP Negeri 2 Tanjung Pura, Langkat Regency. The Indonesia Smart Card program has not been running well and strategically at SMP 2 Tanjung Pura because many poor students do not get the Smart Indonesia Card and the KIP program is not right on target and the distribution is not evenly distributed, the use of funds that is difficult to control is carried out because the distribution of funds is directly transferred to the account students, these funds are the parents of students and the school only as the executor, it is difficult to cover these funds.

Keywords: Effectiveness, Smart Indonesia Card

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan serta kelapangan waktu dan kemudian sehingga saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini yang berjudul “ **Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Dalam di SMP Negeri 2 Tanjung Pura Kabupaten Langkat**”. Sholawat dan salam saya ucapkan untu kekasih Allah SWT Nabi Muhammad SAW mudah mudahan kita mendapat syafa'atnya di akhir nanti. Dalam penulisa n skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga sekripsi dapat terselesaikan dengan baik maka dari itu saya dengan hati yang ikhlas ingin mengucapkan terimakasih kepada :

- Kepada kedua orang tua saya Ayahanda Muhammad Ihsan Pulungan terima kasih atas didikannya selama ini dan dorongannya dan doa nya kepada saya sehinga saya bisa menyelesaikan tugas perkuliahan ini, dan kepada Ibunda saya Syamsiah Nasution terimakasih perhatian nya, dukungan dan nasehatnya selama ini berkat doa nya saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
- Kepada abang saya Mora Alim Firyadh Pulungan, Ariandi Alqadri Pulungan, Muhammad Yusuf Parlindungan Pulungan atas dukungan dan doa nya selama ini.
- Kepada kakak saya Kamaliah Urlia Tari, terimakasih atas doa dan dukungan nya dan perhatian nya kepada saya.
- Kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
- Kepada Ibu Prof. Dr. Ir. Hj.Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area

- Kepada Bapak Prof.Dr. Hamdani Harahap, M.Si selaku dosen pembimbing Tesis I saya yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan thesis ini .
- Kepada Bapak Dr. Abdul Kadir M.Si Selaku dosen Tesis II saya yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun Thesis dan memberi tambahan ilmu serta memberikan masukan.
- Kepada seluruh dosen dan staff pengajar Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Sahabat seperjuangan saya Ledi Fathia terimakasih atas nasehat dan memberi dukungan dan selalu memberi masukan kepada saya.
- Sahabat-sahabat Balqis, Shakty Filla Ananta, Putri Arifina, Rizki Cania tak henti hentinya memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
- Kepada mba saya Ainiel Riany Putri yang selalu support saya dan memberikan semangat yg luar biasa ke saya.
- Kepada rekan-rekan seperjuangan Magister Administrasi Publik UMA Angkatan 2018. mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak di sengaja dan telah menyusahkan kalian semua, terimakasih untuk semuanya.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari pada kesalahan dan kekurangan maka dari itu mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata-kata yang tidak berkenan, kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Medan, Desember 2019

Penulis

Intan Ayuni Pulungan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Teori	8
2.1.1 Pengertian Efektivitas	8
2.2.2 Ukuran Efektivitas	13
2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	17
2.2.4 Pendekatan Terhadap Efektivitas	19
2.2.5 Program Kartu Indonesia Pintar	20
2.2.6 Kebijakan Kartu Indonesia Pintar	23
2.2.7 Tujuan Kartu Indonesia Pintar	23
2.2.8 Manfaat Kartu Indonesia Pintar	24
2.2.9 Prioritas Sasaran Kartu Indonesia Pintar	25
2.3.0 Pemanfaatan Bantuan Siswa Miskin	26
2.3 Mekanisme Pelaksanaan	27
2.3.1 Mekanisme Pengusulan	27
2.3.2 Mekanisme Penetapan Penerima	28

2.3.3 Mekanisme Penyaluran	29
2.3.4 Mekanisme Penyaluran	29
2.3.5 Rekening Tabungan	30
2.3.6 Fungsi Lembaga Pemerintah	31
2.4 Penelitian Terdahulu.....	33
2.5 Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi dan Tempat Penelitian.....	36
3.3 Informan Penelitian	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5 Teknik Analisis Data	38
3.6 Definisi Konsep	39
3.7 Definisi Operasional.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	42
4.1.2 Struktur Organisasi.....	47
4.2 Hasil Penelitian.....	48
4.2.1 Keadaan Narasumber	48
4.2.2 Hasil Wawancara	51
4.3 Pembahasan	63
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	76
5.3 Implikasi Kebijakan	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
Tabel 4.4 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan.....	50
Tabel 4.5 Deskripsi Jumlah Siswa Miskin dan Penerima KIP	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti : ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini mengakibatkan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat (Herlina, 2017). Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia.

Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini mengakibatkan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam menghadapi kehidupan. Melalui

pendidikan yang mencukupi, kita dapat hidup layak seperti yang diharapkan. Tentunya harapan manusia dimasa yang akan datang adalah hal yang baik, yaitu keadaan dimana kehidupan kita lebih baik dari keadaan sekarang. Pendidikan sangat penting dalam mencapai kemajuan di berbagai kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik “orang kaya” maupun “orang miskin” dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil). Menurut Undang – Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global.

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun desa tetap sama. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemiskinan

menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi.

Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia. Arif Rohman (2009:245) menyebutkan bahwa masalah pemerataan pendidikan muncul karena dalam UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran/pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan wajib diselenggarakan oleh pemerintah secara merata untuk seluruh rakyat Indonesia.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas presiden Joko Widodo, yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin/tidak mampu agar tetap mendapat layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah/ sederajat. Melalui PIP ini kita ingin memutuskan kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Tidak ada lagi alasan anak Indonesia untuk tidak sekolah, membantu meringankan biaya pendidikan, mencegah agar siswa tidak putus sekolah, menolong siswa putus sekolah. Saya ingin semua pihak untuk ikut mendorong agar KIP benar-bener sampai ke tangan siswa yang berhak.

Untuk mewujudkan hal itu presiden pada tahun 1994 telah mendeklarasikan pendidikan dasar 9 tahun yang lebih dikenal dengan wajib belajar (WAJAR) 9 tahun yang bertujuan memasukkan semua anak usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) pada pasal 2 memiliki tujuan yaitu :

- Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah untuk

mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;

- Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*droup out*) atau tidak melanjutkan pendidikan karna masalah ekonomi.
- Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/PusatKegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program bantuan tunai pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah, namun berasal dari keluarga yang di pandang kurang mampu secara ekonomi. Program ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sebelumnya pernah ada. Program Indonesia Pintar dengan KIP sebagai fasilitasnya dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh 2 lembaga kementerian, yaitu Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag). Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2016 mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A sebesar Rp 225.000, (dua ratus dua lima ribu rupiah)-/semester (Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah /tahun), tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B sebesar Rp 375.000,(Tiga ratus tujuh puluh luma ribu rupiah)-/semester(Rp 750.000,(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) -/tahun), dan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah/Paket C sebesar Rp 500.000,(Lima ratus ribu rupiah) -/semester(Rp 1.000.000,(Satu juta rupiah) -/tahun), serta Rp 1.000.000,-untuk Peserta Kursus selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun.

Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar yang merupakan bantuan pemerintah jokowi terkesan tidak begitu terlaksana dengan baik dan tidak tepat sasaran di SMP negeri 2 Tanjung Pura. Menurut guru dan warga banyak nama dan data tidak sinkron karna banyak nya siswa miskin yang tidak terdaftar mendapatkan bantuan. Para warga menunding

penerimaan bantuan Indonesia Pintar melalui KIP tidak tepat sasaran dan pendataan dilakukan asal-asalan. Masih banyak warga miskin sangat membutuhkan bantuan tersebut justru sama sekali tidak mendapat.

Masalah lain yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang dilakukan seperti program KIP tidak tepat sasaran dan kurang meratanya pembagiannya, banyak orang tua yang minta di buat kartu KIP ini padahal pihak sekolah tidak tahu pembuatannya karna sekolah hanya mendata penerima KIP dan sekolah sulit untuk mengetahui dana untuk apa saja karna itu langsung ke orang tua, pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di SMP Negeri 2 Tanjung Pura Kabupaten Langkat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. “Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di SMP Negeri 2 Tanjung Pura ?”
2. “Pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar bagi Siswa SMP Negeri 2 Tanjung Pura Kabupaten Langkat”
3. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambatan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Pendidikan Di SMP Negeri 2 Tanjung Pura?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 2 Tanjung Pura Kabupaten Langkat”.
2. “Pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar bagi Siswa SMP Negeri 2 Tanjung Pura Kabupaten Langkat”
3. Apa saja kendala yang di hadapi yang mejadi hambatan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di SMP Negeri 2 Tanjung Pura ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan serta menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan mengenai implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Dinas Pendidikan

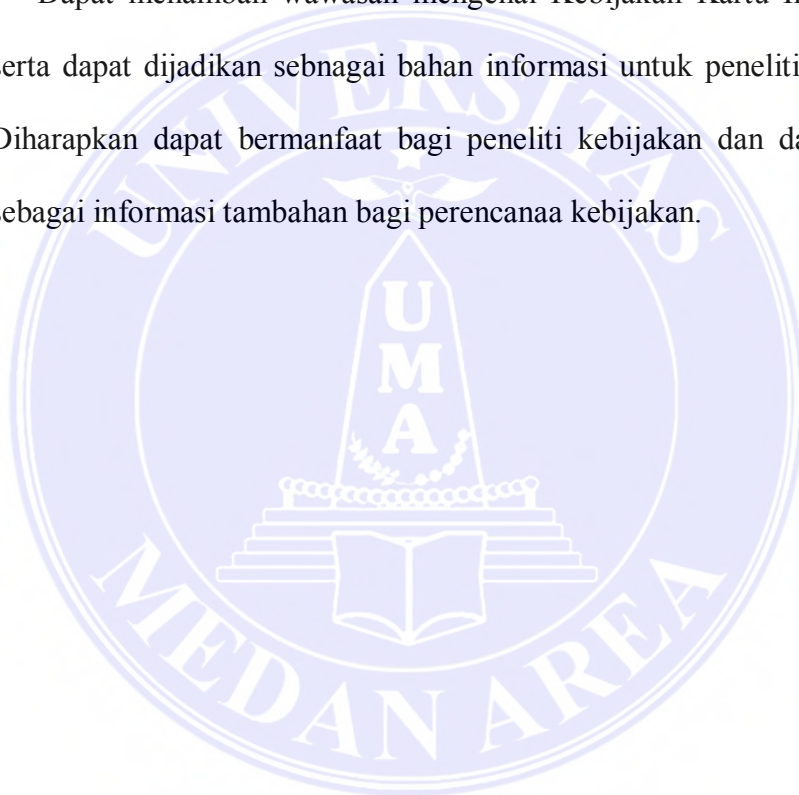
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dalam mengambil keputusan terkait dengan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan layanan pelaksanaan tugas kepada kalangan yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai Kebijakan Kartu Indonesia Pintar serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi perencanaan kebijakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Eektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (2006:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Usaha bersama yang dikelola melalui kelompok yang terorganisir dalam suatu struktur, baik yang berorientasi pada kepentingan bersama maupun kepentingan

golongan, keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dinyatakan “efektif” Menurut Thoah (2008:3) suatu kegiatan organisasi yang efektif jika di dalamnya terdapat interaksi tiga dimensi yaitu: dimensi teknis, si tidak sekedar berarti wadah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, akan tetapi juga merupakan mekanisme yang berlangsung dalam proses kerja sama itu. Oleh karena itu maka organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi yang berhasil bagi pencapaian tujuan apabila ternyata memungkinkan terwujudnya kerja sama yang efektif dalam melaksanakan volume dan beban kerja organisasi tersebut. organisasi dibentuk agar dapat menjadi unit sosial yang paling efektif dan efisien. Efektivitas organisasi diukur dari tingkat sejauh mana ia berhasil mencapai tujuannya, sedangkan efisiensi organisasi dikaji dari segi jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu unit masukan (unit of output). Biasanya masukan berkaitan erat tetapi tidak sama dengan tujuan organisasi. Dalam Ensiklopedi Umum Administrasi (1999:109), disebutkan bahwa “efektivitas” kata kerja efektif berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang dapat terjangkau secara efisien tentu saja pekerjaan itu berarti efektif dilihat dari sisi hasil, tujuan atau akibat yang dikehendaki dengan berbuat itu telah tercapai, bahkan secara maksimal (baik mutu maupun jumlahnya) sebaliknya dilihat dari segi usaha efek yang diharapkan juga telah berhasil dicapai bahkan dengan usaha-usaha yang maksimal. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil mungkin dicapai dengan penghamburan material, juga berupa pikiran, tenaga.

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Menurut Bastian (2006:11) efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan. Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya

Menurut pendapat Ricard M.Streers (dalam Nadia Azlin,2013:18) mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas,yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi.
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisien tetapi tidak efektif berarti dalam memanfaatkan sumberdaya (input) baik, tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tidak efisien berarti dalam mencapai

sasaran menggunakan sumber daya yang berlebihan atau lazim dikata ekonomi biaya tinggi.tetapi yang paling parah adalah efesien ndan tidak efektif,artinya ada pemborosan sumber daya atau penghambur- hambur sumber daya tanpa mencapai sasara. Efisiensi harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur,se sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisiensi dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dar setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efesiensi selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengangu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggiyang diharapkan. Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target(kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen,yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses

pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

2.2.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari siapa yang menilai serta menginterfresentasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Budiani (2009), menetapkan variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan program

Pengukuran efektivitas sebuah program yang dikaji dalam penelitian ini mengacu pada beberapa indikator yakni (1) ketepatan sasaran program; (2) sosialisasi program; (3) tujuan program; dan (4) pemantauan program. Selanjutnya dari keempat indikator tersebut dapat dilihat perihal efektif atau tidaknya sebuah program yang diteliti.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi :

1) Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia teatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

2) Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

4) Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

5) Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok

seperti para petugas dan masyarakat umum. Sedangkan menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya “ Efektivitas Organisasi ” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pegisian tenaga kerja.

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Hasibuan dalam Samsudin Dkk (2014:2) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifivitas program, antara lain :

- a. Kualitas Aparatur Ruky dalam Samsudin Dkk (2014:2) berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.
- b. Kopetensi Administator menurut Rivai dalam Samsudin Dkk (2014:3) menjelaskan bahwa kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertetu.
- c. Sarana prasarana merupakan penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya aktivitas.

Menurut kaho dalam Samsudin Dkk (2014:3) bahwa faktor sarana dan prasarana di artikan sebagai peralatan penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah.

- a. Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas dalam sebuah lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, intruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menurut Gie (2003:29) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain :

- Waktu, ketetapan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama, semakin lama tugas yang dibebankan itu dikerjakan maka semakin banyak pula tugas yang menyusul dan hal ini akan memperkecil

tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit, Tugas bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang diselenggarakan kepada mereka,

- Produktivitas, seorang karyawan mempunyai produktivitas kerja yang tinggi dalam bekerja tentunya akan menghasilkan efektivitas kerja yang baik demikian pula sebaliknya,
- Motivasi, manajer dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka,
- Pengawasan, dengan adanya pengawasan maka kerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalam pelaksanaantugas,
- Lingkungan kerja, lingkungan kerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seorang karyawan sewaktu bekerja,
- Perlengkapan dan fasilitas, suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja. Fasilitas yang kurang lengkap akan mempengaruhi pegawai dalam bekerja. Semakin baik sarana yang disediakan oleh perusahaan akan mempengaruhi semakin baiknya kerja seseorang dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor waktu, tugas, produktivitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan, serta lingkungan kerja dan kelengkapan fasilitas sangat mempengaruhi peningkatan efektivitas dari seseorang untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawainya.

2.2.4 Pendekatan Terhadap Efektivitas

Menurut Gibson (1997:27) bahwa terdapat dua pendekatan dalam mengidentifikasi keefektifan yaitu dengan pendekatan menurut tujuan dan pendekatan menurut teori sistem. Pendekatan menurut sistem adalah untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan usaha kerjasama, sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pada pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria keefektifan.

Selanjutnya Cunningham (1987:635) pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu :

- a. Pendekatan sasaran, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan ini dalam pengukuran efektivitas dimulai yang hendak dicapai. Pendekatan ini dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Selain tercapainya tujuan, efektivitas selalu terkandung unsur dan waktu pelaksanaan. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil yang maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

- b. Pendekatan sumber, pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Pendekatan ini berdasarkan teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lingkungan mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungan, dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungan.
- c. Pendekatan proses, pendekatan proses dianggap sebagai efisiensi dari kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan yang ada berjalan secara terkondisi. Dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan dalam efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses.

2.2.5 Kartu Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar melalui KIP menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan penyempurnaan dari program bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapat manfaat PIP. Pendidikan menjadi salah satu hal terpenting dalam bergeraknya perkembangan sumber daya manusia. Wajib belajar 12 tahun adalah program pemerintah dalam bidang pendidikan yang telah dicanangkan. Beberapa bentuk bantuan pendidikan telah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah salah satu contoh bantuan yang diambil dari APBN.

Dengan perkembangan penduduk yang tergolong pesat, bantuan langsung pemerintah kepada masyarakat dinilai sangat bermanfaat. Kartu Indonesia Pintar adalah bantuan yang diberikan langsung dari pemerintah kepada siswa/peserta didik. Program Indonesia Pintar mengacu kepada siswa yang benar benar membutuhkan.

Namun saat ini pemerintah menamainya dengan Program Kartu Indonesia Pintar. KIP merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang ditujukan kepada anak usia sekolah untuk membantu dana atau biaya keperluan sekolah agar dapat menyelesaikan proses belajarnya. Program KIP diberikan kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kartu Indonesia Pintar ini diberikan sebagai identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan Beasiswa Program Indonesia Pintar apabila anak tersebut mendaftarkan diri ke lembaga pendidikan formal maupun nonformal.

Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program wajib belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah.

Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain.

2.2.6 Kebijakan Kartu Indonesia Pintar

Kartu Indonesia pintar merupakan bantuan pemerintah untuk siswa kurang mampu/miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Pada buku pedoman pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar telah di jelaskan meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan, sasaran, besaran dana, sumber dana, pemanfaatan dana, mekanisme penepatan dan penyaluran KIP, mekanisme pengambilan KIP, tugas dan tanggung jawab sekolah.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak / atau kurang mampu untuk membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutannya dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pemberi bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

2.2.7 Tujuan Program Kartu Indonesia Pintar

Tujuan dari program Kartu Indonesia Pintar ini antara lain sebagai berikut:

- a. meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 12 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan wajib belajar 12 tahun.
- b. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*droup out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

- c. menarik siswa putus sekolah (*droup out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

2.2.8 Manfaat Kartu Indonesia Pintar

Kartu Indonesia Pintar (KIP) sendiri memiliki beberapa manfaat yaitu:

- a) Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-12 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus.
- b) Untuk tahap awal di 2014, KIP telah di cetak untuk sekitar 160 ribu siswa di sekolah umum dan juga madrasah di 19 Kabupaten/Kota. Untuk 2015, diharapkan KIP dapat diberikan kepada 20,3 juta anak usia sekolah baik dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang ditetapkan (seperti anak dari keluarga peserta PKH)
- c) Kartu indonesia pintar juga mencakup anakusia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah.

- d) KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.
- e) KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

2.2.9 Prioritas Sasaran Penerima Kartu Indonesia Pintar

Sasaran KIP adalah anak berusia 6 sampai 21 tahun yang merupakan:

- a. penerima BSM 2014 pemegang KPS.
- b. siswa/anak dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP yang belum menerima BSM 2014.
- c. siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS.
- d. siswa/anak yang berstatus yatim piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan. e) siswa/anak yang terkena dampak bencana alam.
- e. anak usia 6 sampai 21 tahun yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah.
- f. siswa/anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah, SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang Pertanian (bidang Agrobisnis, Argoteknologi, Perikanan, Peternakan,

Kehutanan dan Pelayaran/ Kemaritiman. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya

2.3.0 Pemanfaatan Bantuan Siswa Miskin atau Program Indonesia Pintar

Pengertian pemanfaatan menurut kamus besar bahasa indonesia menyebutkan bahwa pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan yang mengandung arti yaitu proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian pemanfaatan berdasarkan pengertian masing-masing adalah guna, proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu dalam hal ini pemanfaatan terhadap efektivitas penggunaan alokasi dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap kegiatan pembiayaan dalam proses pembelajaran selama menempuh pendidikan. Pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan petunjuk teknis Program Indonesia Pintar tahun 2015 antara lain:

- 1) Pembelian buku dan alat tulis sekolah;
- 2) Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
- 3) Transportasi siswa ke sekolah;
- 4) Uang saku siswa ke sekolah;
- 5) Biaya kursus/les yang tidak diselenggarakan oleh sekolah.

Dana Program Indonesia Pintar diterima langsung oleh siswa atau orang tua dan penerima berkewajiban menggunakan dana PIP 2015 sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana dari pemerintah.

2.3 Mekanisme Pelaksanaan

2.3.1 Mekanisme Pengusulan

Peserta didik dapat diusulkan oleh sekolah/lembaga pendidikan nonformal pada waktu yang akan ditentukan kemudian, mekanisme sebagai berikut:

Sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menseleksi dan menyusun daftar peserta didik yang masih aktif dan tidak memiliki KIP sebagai calon penerima dana PIP dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- c. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 1. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
 2. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
 3. Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
 4. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
- d. Untuk jenjang SD dan SMP, sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik di aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana/ manfaat PIP. Selanjutnya dinas kabupaten/kota mengusulkan melalui aplikasi pengusulan PIP yang dapat di akses

di laman: *data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pipdikdasmen*.

- e. Berdasarkan data hasil verifikasi pada aplikasi PIP, dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan tertulis, dan selanjutnya menyampaikan/meneruskan daftar peserta didik calon penerima PIP dari sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal ke direktorat teknis terkait. Data ini merupakan usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

2.3.2 Mekanisme Penetapan Penerima

Penetapan penerima dana PIP dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Siswa kelas 6, 9, dan 12 tahun ajaran 2015/2016 yang telah terdaftar sebagai penerima PIP pada tahun sebelumnya dapat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai penerima dana/manfaat PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan.
2. Siswa SMK penerima PIP yang menempuh studi keahlian kelompok pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/ Kemaritiman yang ada dalam aplikasi Dapodik dapat langsung ditetapkan sebagai penerima PIP.
3. Untuk peserta Paket A/B/C, penetapan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat PSD, PSMP, PSMA setelah menerima surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemendikbud.
4. Untuk peserta kursus/pelatihan penetapan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK setelah menerima surat keputusan penetapan

penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemendikbud.

2.3.3 Mekanisme Penyaluran

Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik penerima melalui mekanisme sebagai berikut: Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum dalam surat keputusan direktur ke lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening. Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur. KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan/memindahbukuan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dengan lembaga penyalur. Direktorat teknis menginformasikan daftar peserta didik penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan surat keputusan penerima. Peserta didik mengambil/mencairkan dana KIP di lembaga penyaluran.

2.3.4 Pengambilan Dana

Berdasarkan Peraturan Bersama antara Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 08/D/PP/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2016,

pengambilan/pencairan dana PIP dilakukan oleh peserta didik/penerima kuasa di bank penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Virtual Account

- a. Pengambilan langsung oleh peserta didik dengan membawa Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga. Untuk peserta didik yang tidak memiliki KTP didampingi oleh guru/kepala sekolah/orangtua/wali.
- b. Pengambilan secara kolektif oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dengan membawa dokumen sebagai berikut:
 1. Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga.
 2. Foto kopi KTP kepala sekolah/ketua lembaga.
 3. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga defenitif yang masih berlaku.
 4. Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM).

2.3.5 Rekening Tabungan

Rekening Tabungan Sebelum pencairan/pengambilan dana, untuk rekening tabungan harus dilakukan aktivasi terlebih dahulu oleh peserta didik, dengan membawa:

1. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan
2. Tanda pengenal (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah). Untuk peserta didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP didampingi oleh guru/kepala sekolah/orangtua/wali. Setelah aktivasi, dana PIP dapat langsung diambil/dicairkan oleh peserta didik penerima. Pengambilan dana dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pengambilan langsung oleh peserta didik dengan membawa tanda pengenal seperti: KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan buku tabungan.
- b. Pengambilan secara kolektif oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dengan membawa Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/paket A dan SMP/paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/paket C dan SMK/Lembaga Kursus) penerima PIP, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Foto kopi KTP kepala sekolah/ketua Lembaga.
 - Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga defenitif yang masih berlaku.
 - Buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif.
 - Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM). Pengambilan kolektif dapat dilakukan apabila penerima PIP berada di daerah yang sulit untuk mengakses kebank/lembaga penyalur (tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik), biaya transport pengambilan lebih besar/tidak seimbang dari bantuan yang akan diterima), atau cuaca buruk/kondisi lingkungan yang membahayakan siswa.

Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2.3.6 Peran dan Fungsi Lembaga Pemerintah

a. Direktorat Teknis

Pengelola BSM/PIP 2015 adalah Direktorat teknis yang terdiri dari (a) Direktorat Pembinaan SD; (b) Direktorat Pembinaan SMP; (c) Direktorat Pembinaan

SMA; (d) Direktorat Pembinaan SMK; (e) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; dan (f) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Direktorat teknis memiliki peran dan fungsi untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan program PIP yang dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis, melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP, mendorong sekolah satuan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengentri data siswa calon penerima PIP baik yang memiliki KPS/KKS/KIP maupun usulan sekolah ke dalam aplikasi Dapodik, melakukan identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data siswa calon penerima PIP, menetapkan daftar penerima BSM/PIP 2015 dalam bentuk surat keputusan (SK), menetapkan lembaga penyalur, menginformasikan daftar penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan SK penerima, menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan PIP, melakukan pemantauan implementasi PIP dan menyusun laporan pelaksanaan PIP.

b. Dinas Pendidikan Provinsi

Peran dan fungsi dinas pendidikan provinsi adalah mensosialisasikan program PIP 2015 kepada seluruh Kabupaten/ Kota dan masyarakat di wilayahnya, mendorong kepala sekolah untuk melaporkan siswanya sesuai prioritas sasaran, mengikuti kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembinaan tingkat pusat, memantau implementasi PIP sesuai juknis.⁶⁹

c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan PIP yaitu mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP kepada seluruh sekolah dan masyarakat, memantau sekolah untuk memutakhirkan data siswa calon

ke dalam aplikasi Dapodik, mengesahkan usulan dari sekolah dan selanjutnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK, menyampaikan surat keputusan (SK) direktur teknis perihal penerima BSM/PIP ke sekolah, memantau pelaksanaan penyaluran dana BSM/PIP kepada siswa/anak penerima, menangani pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan BSM/PIP.

d. Sekolah/Lembaga Pendidikan

Peran dan fungsi sekolah dalam pelaksanaan PIP adalah menyeleksi dan mengusulkan siswa calon penerima dana BSM/PIP sesuai prioritas sasaran, menginformasi kepada siswa penerima bahwa dana BSM/PIP 2015 telah siap diambil, membuat surat keterangan kepala sekolah sebagai persyaratan pengambilan dana oleh siswa di lembaga penyalur, memberikan pengarahan kepada siswa penerima dana BSM/PIP 2015 dalam pemanfaatan dana, memantau proses pencairan dana BSM/PIP di lembaga penyalur dan sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tidak bersekolah dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP sebagai calon peserta/warga belajar untuk diusulkan sebagai calon penerima dana BSM/PIP.

2.4 Penelitian Terdahulu

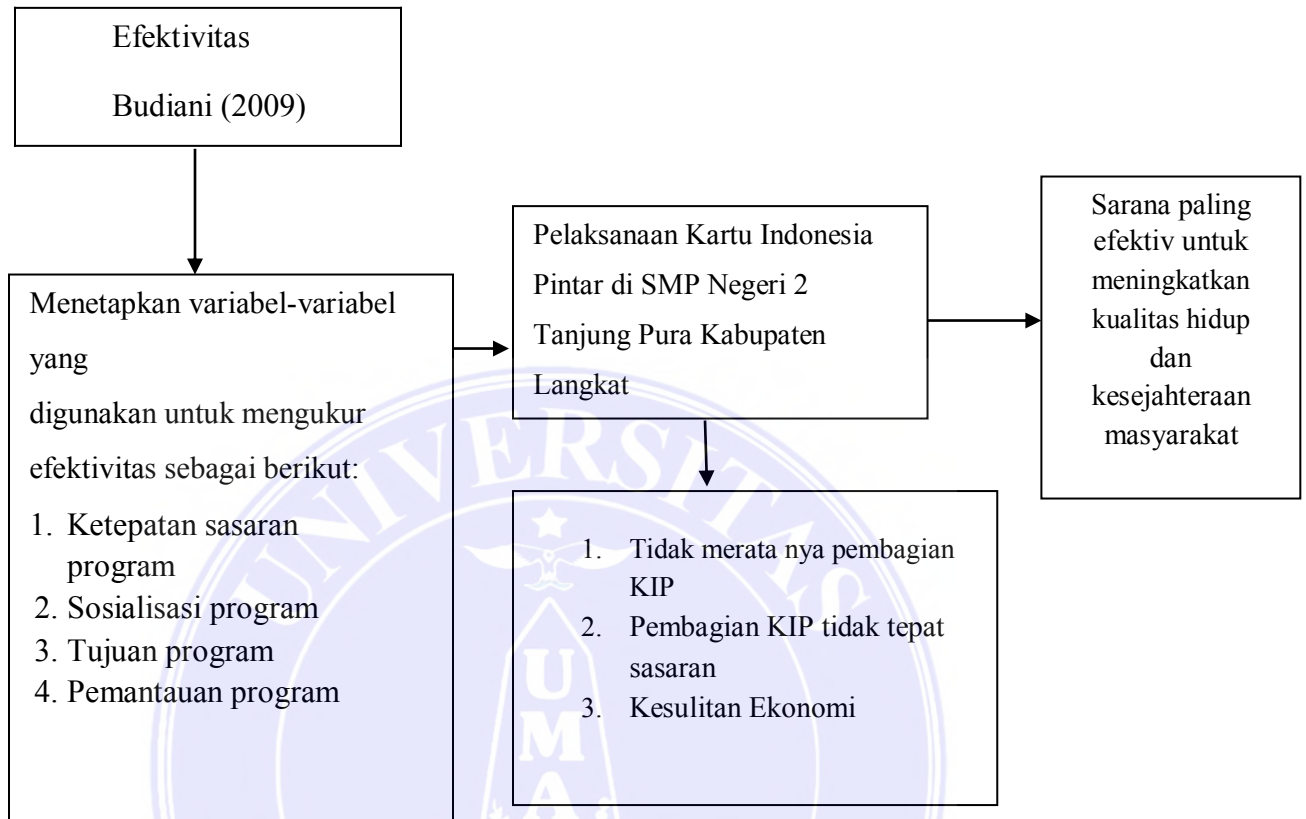
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis

mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	KESIMPULAN
1	Saras Setyawati	Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap	Kartu Indonesia Pintar bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap diberikan kepada siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu dalam keadaan sehari-harinya dan dalam membiayai anak-anak mereka masih kekurangan. Pemanfaatan dana dari Kartu Indonesia Pintar untuk Pembelian Buku dan alat tulis sekolah, seragam sekolah, uang saku siswa, serta biaya les tambahan siswa
2	Nurul Fatma Hasan	Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan (Studi Kasus pada siswa peserta PIP dari Keluarga PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo)	Siswa peserta PIP dari keluarga peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo, tercatat 56% dari peserta PIP yang menggunakan hanya sebagian dana bantuan PIP untuk keperluan Pendidikan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa penggunaan dana bantuan pendidikan dari pemerintah melalui program Indonesia Pintar kurang efektif. Sedangkan untuk dana bantuan melalui PKH, tercatat 60% dari peserta PKH yang menggunakan hanya sebagian dana bantuan PKH untuk keperluan pendidikan dan kesehatan

Gambar 2.1

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian. Adapun lokasi penelitian ini di SMP Negeri 2 Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan waktu penelitian ini pada bulan Januari sampai Februari

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian seseorang yang benar benar mengetahui sesuatu persoalan atau masalah tertentu yang dapat diperoleh informn yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pertanyaan, keterangan atau data data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan atau permasalahan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
2. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Pura
3. Guru SMP Negeri 2 Tanjung Pura
4. Siswa SMP Negeri 2 Tanjung Pura
5. Orang Tua Siswa SMP Negeri 2 Tanjung Pura.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara :

- Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, yang dilakukan dengan instrumen metode wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
- Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti: buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.5 Teknik Analisa Data

- Reduksi data (Data reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

- Penyajian data (Data Display).

Penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

- Penarik Kesimpulan (Conclusion drawing/ verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.6 Definisi Konsep

Nawawi (1991: 43), mengemukakan, konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan di teliti.

1. Efektivitas adalah usaha atau proses dalam mencapai suatu tujuan dan target sasaran yang hasilnya diharapkan dapat memenuhi dan memperhatikan kepentingan orang banyak dan dapat dirasakan manfaatnya bagi orang banyak.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kemampuan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa yang bersekolah yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

3.7 Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

1. Efektivitas Program

Efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut. Untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Ketepatan Sasaran Program
- b. Sosialisasi Program
- c. Tujuan Program
- d. Pemantauan Program.

Efektivitas merupakan keberhasilan suatu program atau organisasi dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin besar keluaran yang dihasilkan dari sasaran yang akan dicapai maka program dan organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. Dimensi dari efektivitas adalah:

- a) Pengetahuan program, yaitu tingkat pengetahuan siswa mengenai program.
- b) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada siswa.
- c) Tujuan program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d) Pemanfaatan program, yaitu sejauhmana siswa memanfaatkan program.
- e) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

f) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Berdasarkan pernyataan di atas efektivitas yang dimaksudkan ini adalah kegiatan yang selalu berorientasi pada pencapaian tujuan suatu program atau kebijakan dari organisasi. Organisasi dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yang tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai sendiri-sendiri. Jadi dengan organisasi sebagai alat itulah, orang atau orang-orang ingin mencapai tujuan. Dengan demikian, efektivitas merupakan keberhasilan organisasi dalam menjalankan program atau kebijakannya melalui berbagai sarana dan cara serta upaya memanfaatkan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta dalam mencapai ukuran efektivitas program atau kebijakan sebuah organisasi dapat menggunakan kriteria-kriteria di atas.

2. Program Kartu Indonesia Pintar

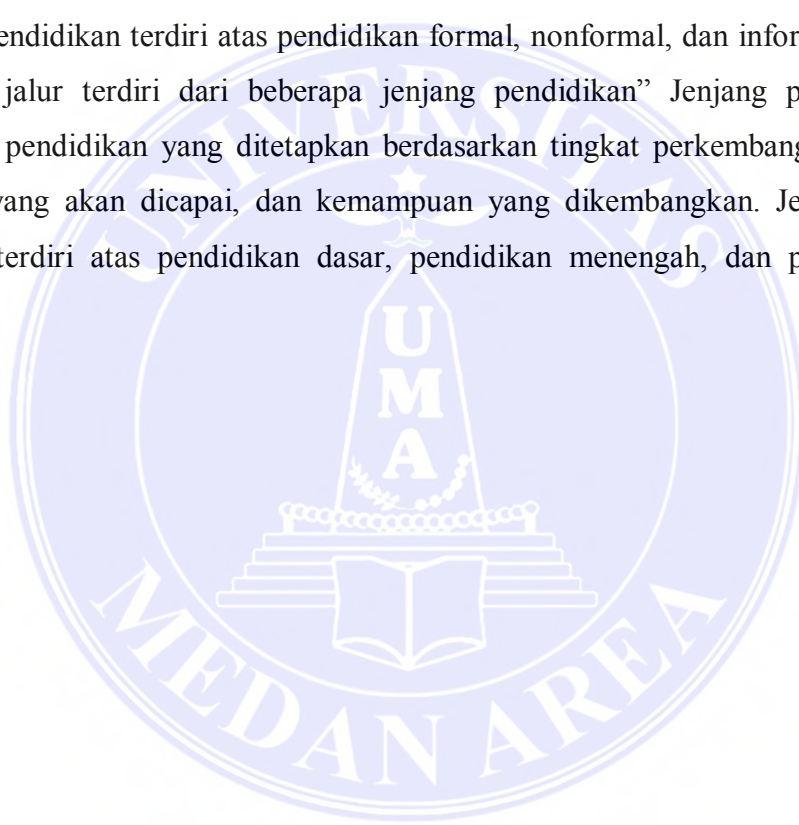
Program Kartu Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang mengamanatkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai penyempurnaan dari program sebelumnya yaitu Bantuan Siswa Miskin. Program Indonesia Pintar bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah dan mencegah atau menarik peserta didik putus sekolah.

Dalam hal ini peneliti akan lebih memfokuskan pada seberapa besar tingkat efektivitas

Program Indonesia Pintar melalui pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar bagi siswa pada jenjang pendidikan SMP.

3. Jenjang Pendidikan SMP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa 21 Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP), “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang masing-masing jalur terdiri dari beberapa jenjang pendidikan” Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.



BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, serta berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, maka hasil penelitian efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 2 Tanjung Pura belum efektif.

- Ketepatan Sasaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 2 Tanjung Pura masih belum tercapai. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kerja sama antara pihak instansi dan implemantor dalam pendataan penerima Kartu Indonesia Pintar sehingga masih banyak siswa yang tidak mampu mendapat Kartu Indonesia Pintar tersebut, selain itu dana bantuan terkadang disalahgunakan oleh orangtua maupun anak penerima Kartu Indonesia Pintar tersebut untuk keperluan lain diluar tujuan Kartu Indonesia Pintar itu sendiri padahal tujuan Kartu Indonesia Pintar untuk membantu hambatan ekonomi siswa yang tidak mampu sehingga dengan adanya Katu Indonesia Pintar bisa membantu rakyat yang kurang mampu untuk meningkatkan semangat belajarnya dalam pendidikan.

Sosialisasi Program Kartu Indonesia Pintar yang dijalankan sudah berjalan dengan baik, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi diri mereka dalam belajar di sekolah dan siswa yang mau belajar cukup meningkat dan semangat belajar siswa baik dengan adanya bantuan Kartu Indonesia Pintar, yang artinya para pelaksana Kartu Indonesia Pintar dapat menjalankan

Program Kartu Indonesia Pintar dengan baik dan meningkatkan semangat belajarnya guna berprestasi di sekolah.

- Tujuan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 2 Tanjung Pura belum sepenuhnya tepat waktu. Hal ini dikarenakan bank penyalur yang terlalu sibuk dan kurang berpartisipasi dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga masih banyak Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum tersalurkan. Lambatnya penyaluran Kartu Indonesia Pintar membuat Kartu Indonesia Pintar tidak berjalan dengan lancar.
- Pemantauan Program dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar masih belum terpenuhi, contohnya seperti bank penyalur yang kurang berpartisipasi dalam penyaluran dana Program Kartu Indonesia Pintar tersebut. Lambatnya bank penyalur Program Kartu Indonesia Pintar menyebabkan penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar tidak berjalan dengan baik dan efektif, sehingga hambatan siswa untuk mendapatkan dana bantuan belum sepenuhnya berjalan cukup baik. Pemerintah seharusnya membantu untuk kecepatan penyaluran dana agar siswa yang belum mendapatkan dana segera mendapatkannya dan bisa membeli kebutuhannya dengan cepat.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran-saran dalam efektivitas pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di SMP Negeri 2 Tanjung Pura sebagai berikut :

- Perlu diharapkan lagi agar Kartu Indonesia Pintar dapat di peroleh bagi siswa miskin agar bisa dapat terbantu dengan adanya KIP ini untuk memenuhi kebutuhan sekolah nya dan siswa bisa meningkatkan presrasi belajar nya dengan baik.
- Perlu adanya kerja sama oleh pihak instansi dan pihak pelaksana Kartu Indonesia Pintar dalam pendapatatan siswa miskin.
- Perlu adanya pengawasan yang intens terhadap pelaksana Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri 2 Tanjung Pura, seperti dari pihak pelaksana apakah program ini sudah berjalan dengan semestinya.

5.3 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum berjalan dengan baik, karna para implemantor perlu menjelaskan tujuan dari Program Kartu Indonesia Pintar kepada siswa dan orang tua penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), agar siswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan potensi diri mereka dalam bersekolah.

Hasil Penelitian ini akan memberikan masukan bagi para pihak instansi terkait. Dalam Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), para implemantor perlu menjelaskan tujuan dari Program Kartu Indonesia Pintar kepada siswa dan orang tua penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), agar siswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan potensi diri mereka dalam bersekolah.

Perlu diharapkan lagi agar Kartu Indonesia Pintar dapat di peroleh bagi siswa miskin agar bisa dapat terbantu dengan adanya KIP ini untuk memenuhi kebutuhan sekolah nya dan siswa bisa meningkatkan presrasi belajar nya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Cunningham, J. Barton, 1987, *Suatu Sumber Pendekatan Sumber Daya Dalam Evaluasi dan Keefektifitasan Organisasi*, Human Relations: Jakarta
- Edy, Sutrisno. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit: Jakarta, Kencana.
- Efendy, Onong Uchjana. 2008. Dinamika Komunikasi. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya
- Gibson, James L. 1997. Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Gibson, et al, 1992. *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Erlangga
- Gie, the liang 2003, *Administrasi Perkantoran Modern*, Edisi Ketujuh, Liberty: Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 1991. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 200 Halaman
- Soewarno Handyaningrat, 2006, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Gunung Agung.
- Thoha, Miftah, 2008 Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta PT Raja Grafindo Persana

B. Jurnal

- Budiani, Ni Wayan. (2007) .“Efektivitas program penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”, INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial Volume 2 Nomor 1, Bali: Universitas Udayana.
- Malingga, Marhen. Pengaruh pemerintah KIP dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) terhadap konsumsi rumah tangga miskin di kecamatan Dumonga Timur Kabupaten Bolang Mongondo Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi: Volume 19. No 01 Tahun 2019
- Nurul Fatma Hasan (2017) Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan (Studi Kasus pada siswa Peserta PIP Dari Keluarga PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo)
- Saras Setyawati (2016) Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bagi siswa SMK Di Kecamatan Jeruk Lengi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar)

Setiawan,Budi . Implementasi program KIP pada jenjang sekolah menengah pertama di lihat dari karakteristik agen pelaksana Volume 2,No 2 Novembe 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan PP 25 Tahun 2005

D. Internet

<http://www.google.co.id>

